

Analysis of the Ministry of Religion's Program in Realizing Religious Moderation in Bantul Regency Society (Peter L. Berger's Social Construction Perspective)

Dwi Afriyanto^{1*}, Sri Sumarni², Sembodo Ardi Widodo³
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Corresponding Author: Dwi Afriyanto dwiafriyanto27@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Religious Moderation, Social Construction, Bantul Society

Received : 11, February

Revised : 18, March

Accepted: 23, April

©2024 Afriyanto, Sumarni, Widodo:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Religious moderation is essential to prevent conflict in a diverse society. This study analyzes the program of the Ministry of Religious Affairs in Bantul Regency using Peter L. Berger's social construction theory. Field research with a qualitative approach found that religious moderation is formed through three social dialectic processes: externalization, namely the adaptation of individuals to the social structure of religious moderation through religious texts and figures; objectivation, namely the development of awareness of moderation as a positive action through tradition and institutionalization; and internalization, namely the identification of individuals in the socio-cultural context that forms inclusive and exclusive groups. The program of the Ministry of Religious Affairs in Bantul Regency plays an important role in building a social foundation that supports religious moderation in Bantul.

Analisis Program Kementerian Agama dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Masyarakat Kabupaten Bantul (Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger)

Dwi Afriyanto^{1*}, Sri Sumarni², Sembodo Ardi Widodo³

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Corresponding Author: Dwi Afriyanto dwiafriyanto27@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Konstruksi Sosial, Masyarakat Bantul

Received : 11, Februari

Revised : 18, Maret

Accepted: 23, April

©2024 Afriyanto, Sumarni, Widodo:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Moderasi beragama sangat penting untuk mencegah konflik di masyarakat yang beragam. Penelitian ini menganalisis program Kementerian Agama di Kabupaten Bantul menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini menemukan bahwa moderasi beragama dibentuk melalui tiga proses dialektika sosial: eksternalisasi, yaitu adaptasi individu dengan struktur sosial moderasi beragama melalui teks dan tokoh agama; objektivasi, yaitu pembangunan kesadaran moderasi sebagai tindakan positif melalui tradisi dan pelebagaan; dan internalisasi, yaitu identifikasi individu dalam konteks sosio-kultural yang membentuk kelompok inklusif dan eksklusif. Program Kementerian Agama Kabupaten Bantul berperan penting dalam membangun fondasi sosial yang mendukung moderasi beragama di Bantul.

PENDAHULUAN

Kabupaten Bantul memiliki keragaman etnis, suku, budaya, dan agama, dengan luas wilayah 506,85 km² yang terbagi menjadi 17 kecamatan (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2023). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, jumlah masyarakat berdasarkan agama adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Masyarakat Kabupaten Bantul Berdasarkan Agama (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2023)

No	Agama	Persentase
1	Islam	929.740 jiwa (96%)
2	Katolik	24.725 jiwa (2,6%)
3	Protestan	12.745 jiwa (1,3%)
4	Hindu	777 jiwa (0,1%)
5	Budha	204 jiwa (0,02%)
6	Lainnya	46 jiwa (0,005%)

Kemajemukan masyarakat di Kabupaten Bantul menyebabkan polarisasi atau stratifikasi sosial yang beragam (Aslati, 2014). Interaksi sosial, baik antar maupun intra agama, memiliki potensi konflik karena agama sering digunakan untuk tujuan politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Hubungan antaragama sering terganggu oleh prasangka yang dipengaruhi oleh persepsi subjektif dan berbagai penafsiran (Zaki, 2018). Sebagai daerah yang plural dan multikultural, Kabupaten Bantul memiliki potensi tinggi untuk terjadinya konflik berlatar belakang agama

Konflik yang berasal dari latar belakang agama bisa timbul di antara berbagai faksi atau aliran dalam satu agama (sektarian atau intra-agama), atau antar kelompok-kelompok dari agama yang berbeda (komunal atau antar-agama) (Kementerian Agama RI, 2019).

Antara tahun 2018-2023, terdapat beberapa insiden pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Provinsi DIY, termasuk di Kabupaten Bantul. Tabel dibawah ini mencatat beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan yang terjadi.

Tabel 2. Data Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama/Keyakinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2023 (Rohman, 2023)

No	Kasus	Penyelesaian
1	Insiden penyerangan terhadap kegiatan ibadah (misa) di Gereja St Lidwina Bedog, Sleman pada Februari 2018	Kanwil Kemenag DIY aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan aman dan damai. Pelaku penyerangan, Suliono, telah ditangkap dan diproses sesuai hukum.
2	Pengrusakan dan ancaman yang terjadi pada acara tradisi	Pelaku ditahan polisi untuk penyelidikan lanjutan.

	sedekah laut di Bantul pada Oktober 2018	
3	Pelarangan warga non-muslim untuk menyewa kos atau kontrak (kasus Slamet Jumiarto) pada Maret 2019 di Pleret, Bantul	Peraturan POKGIAT yang dianggap tidak adil telah ditarik kembali karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip aturan yang lebih tinggi.
4	Penolakan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Desa Argorejo, Sedayu, Bantul pada Juli 2019	Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Bupati Bantul mengakibatkan pihak gereja mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
5	Pemaksaan pemakaian jilbab pada siswi SMPN 1 Pandak di Pandak, Bantul pada Juli 2022	Klarifikasi dan permintaan maaf dari Kepala Sekolah dan guru terkait di SMPN 1 Pandak (Ari, 2022).
6	Pemaksaan pemakaian jilbab pada siswi di SMAN 1 Banguntapan, Bantul pada Juli 2022	Gubernur DIY menonaktifkan Kepala Sekolah dan 3 guru SMAN 1 Banguntapan (Rachmawati, 2022).
7	Penutupan Patung Bunda Maria di Rumah Doa Sasana Adhi Rasa ST Yacobus karena desakan masyarakat di Dusun Degolan, Kulon Progo pada Maret 2023	Kapolres Kulon Progo, AKBP Muharomah Fajarini mengatakan alasan penutupan dilakukan karena rumah doa itu masih dalam proses penyelesaian serta sedang dalam tahap mengurus perizinan (Jateng, 2023).

Data tentang pelanggaran kebebasan beragama atau kepercayaan di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya intoleransi yang masih terjadi di masyarakat dan rentan terhadap konflik yang meluas. Dibutuhkan upaya preventif jangka panjang untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa tersebut. Salah satu strategi pencegahan adalah memperkuat cara pandang moderat terhadap agama (Kementerian Agama RI, 2019). Norma-norma keagamaan yang diperkenalkan oleh institusi keagamaan negara dapat memperkuat polarisasi di antara kelompok agama (Bowen, 2010), menciptakan prasangka yang menghalangi moderasi beragama (Basedau & Koos, 2015). Dalam situasi ini, Kementerian Agama Kabupaten Bantul berperan penting dalam mempromosikan dan menjaga harmoni serta kesejahteraan umat beragama melalui program dan kebijakan yang mereka terapkan.

Perkembangan isu-isu sosial dalam masyarakat dapat berdampak pada proses pendidikan di sekolah atau madrasah. Di tengah persaingan nilai-nilai agama yang terjadi di ruang publik sekolah, penting untuk mengkaji moderasi beragama sebagai topik yang relevan dan mendesak untuk dibahas (Kevin Nobel Kurniawan, 2021). Institusi pendidikan formal maupun informal seperti sekolah, madrasah, pesantren, dan komunitas belajar memainkan peran penting dalam menanamkan sikap moderat kepada peserta didik. Moderasi beragama adalah nilai yang perlu disosialisasikan. Peserta didik yang diajarkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap

budaya dapat menghargai keberadaan kelompok beragama (Çalışkan & Sağlam, 2012). Melalui proses sosialisasi moderasi beragama, peserta didik dapat berkontribusi terhadap pengembangan moderasi beragama di masyarakat luas (Brisko, 2012). Lembaga-lembaga agama dan institusi pendidikan harus bekerja sama dalam membangun toleransi melalui program dan kebijakan yang efektif. Program dan kebijakan yang tepat dalam mempromosikan moderasi beragama dapat mengurangi intoleransi dan menciptakan masyarakat yang inklusif.

Moderasi beragama merupakan elemen krusial dalam mempromosikan harmoni dan saling menghormati antar umat beragama. Ini menciptakan lingkungan di mana umat beragama dapat hidup bersama secara damai dan menghargai satu sama lain tanpa memandang perbedaan keyakinan (Kementerian Agama RI, 2019). Sikap moderat dalam beragama memiliki potensi untuk menyatukan bangsa jika keragaman dielaborasi dengan baik dan dialog antarumat beragama dikelola dengan efektif. Konflik antarumat beragama sering terjadi karena prasangka negatif dan miskomunikasi antara mereka (Nazmudin, 2018).

Penelitian tentang program kementerian agama dalam mewujudkan moderasi beragama masyarakat Kabupaten Bantul penting untuk memahami bagaimana kontribusinya dalam membangun masyarakat yang moderat dan inklusif. Penelitian ini akan menganalisis berbagai program Kementerian Agama di Bantul dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, dengan tujuan mengembangkan literatur akademis dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan di bidang pendidikan dan keagamaan.

KAJIAN LITERATURE

Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang berarti mencapai keseimbangan, baik dalam hal tidak berlebihan maupun tidak kekurangan. Kata ini juga mencerminkan kemampuan untuk mengontrol diri dari perilaku yang ekstrim (Kementerian Agama RI, 2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi dijelaskan sebagai upaya untuk mengurangi kekerasan dan menghindari sikap yang ekstrem (Kemendikbud, 2024). Dalam bahasa Inggris, *moderation* sering diinterpretasikan sebagai rata-rata, inti, standar, atau netralitas. Dalam bahasa Arab, istilah moderasi dikenal sebagai *wasath* atau *wasathiyah*, yang artinya berada di tengah-tengah, adil, dan seimbang, serta juga dianggap sebagai pilihan terbaik. Semua istilah ini mengandung makna yang serupa, yaitu adil dan seimbang (Aziz & Anam, 2021).

Dalam konteks agama, sikap moderat menunjukkan pemilihan pandangan, sikap, dan tindakan yang berada pada posisi tengah di antara segala bentuk ekstrem. Sebaliknya, ekstremisme agama melibatkan pandangan, sikap, dan tindakan yang melebihi batas-batas moderasi dalam memahami dan pengamalan agama. Dengan demikian, moderasi agama dapat dijelaskan sebagai cara pandang, sikap, dan tindakan yang berusaha untuk tetap seimbang, adil, dan tidak terlalu ekstrem. Pendekatan ini menekankan

keseimbangan antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dengan menghargai dan menghormati praktik keagamaan orang lain yang berbeda (inklusif).

Prinsip dasar moderasi beragama terdapat dalam al-Qur'an, yang mengajak umat beriman untuk tidak berlebihan dalam praktik keagamaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 77, "*Katakanlah (Nabi Muhammad), Wahai Ahlulkitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam (urusan) agamamu tanpa hak.*" Jika Islam meminta penganut agama lain untuk tidak bersikap berlebihan (*ghuluw*) dalam menjalankan agamanya, maka penganut Islam tentu harus menerapkan prinsip ini terlebih dahulu. Inilah inti dari moderasi beragama: tidak berlebihan dalam menjalankan agama, sesuai dengan ajaran agama itu sendiri.

Prinsip dasar moderasi dalam beragama mencakup keadilan dan keseimbangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan diartikan sebagai: 1) tidak memihak; 2) mendukung kebenaran; dan 3) bertindak sesuai aturan atau tidak sewenang-wenang. Istilah wasit, yang mengacu pada orang yang memimpin pertandingan, juga dapat diinterpretasikan sebagai seseorang yang netral dan objektif. Prinsip keseimbangan meliputi komitmen terhadap keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Sikap seimbang tidak berarti tidak memiliki pendirian, melainkan mempertahankan ketegasan tanpa keras, dan selalu mendukung keadilan tanpa merugikan pihak lain. Keseimbangan mencerminkan pendekatan yang proporsional dalam memperlakukan segala hal, tidak berlebihan atau kurang, dan tidak ekstrem dalam pandangan konservatif atau liberal (Kementerian Agama RI, 2019).

Penelitian ini menggunakan indikator moderasi beragama seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan budaya lokal. Indikator-indikator ini mengukur seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kabupaten Bantul dan menentukan tingkat kerentanan mereka. Pertama, komitmen kebangsaan adalah ukuran yang signifikan dalam menilai pengaruh pandangan, sikap, dan praktik keagamaan seseorang terhadap kesetiaan mereka terhadap nilai-nilai fundamental negara. Ini mencakup penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikap terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta semangat nasionalisme. Komitmen kebangsaan juga melibatkan dukungan terhadap prinsip-prinsip kebangsaan yang tercantum dalam Konstitusi UUD 1945 dan peraturan yang relevan. Kedua, toleransi adalah sikap menghargai hak orang lain untuk berkeyakinan dan menyatakan pendapat, meskipun berbeda dengan kita. Ini melibatkan sikap terbuka, menghormati perbedaan, dan menerima dengan baik. Toleransi juga mencakup penerimaan terhadap keberagaman dan penting dalam konteks demokrasi karena memungkinkan kita menerima pandangan yang beragam.

Ketiga, radikalisme dalam konteks moderasi beragama adalah ideologi yang mengadvokasi perubahan sosial dan politik melalui kekerasan atau ekstremisme, termasuk kekerasan verbal, fisik, dan mental atas nama agama. Intinya, radikalisme melibatkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan

perubahan yang drastis dan cepat, sering kali melawan sistem sosial yang ada. Meskipun sering dikaitkan dengan agama tertentu, radikalisme dapat muncul dalam berbagai konteks agama. Radikalisme bisa muncul dari persepsi ketidakadilan dan rasa terancam yang dialami individu atau kelompok, dan dapat berkembang menjadi ideologi yang memupuk kebencian terhadap kelompok yang dianggap mengancam atau tidak adil terhadap identitas mereka. Keempat, praktik keagamaan yang mengakomodasi budaya lokal mencerminkan seberapa besar seseorang menerima tradisi dan budaya setempat dalam amalan keagamaannya. Individu yang moderat cenderung menerima integrasi tradisi dan budaya dalam praktik keagamaan mereka, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip utama agama. Fleksibilitas dalam beragama menunjukkan kesiapan untuk menekankan nilai-nilai positif dalam praktik keagamaan, sambil tetap mematuhi norma-norma agama yang berlaku.

Konstruksi Sosial Peter L. Berger

Teori konstruksi sosial oleh Berger dan Luckman menyatakan bahwa agama, sebagai bagian dari budaya, adalah hasil dari konstruksi manusia. Ini berarti ada hubungan timbal balik antara masyarakat dan agama. Agama, yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang ada di luar individu manusia, mengalami proses menjadi sesuatu yang dianggap nyata karena diakui dan diinterpretasikan oleh manusia. Baik dalam bentuk teks maupun norma, agama kemudian menjadi bagian dari kehidupan individu karena telah diinternalisasi dan dijadikan pedoman atau gaya hidup (Berger & Luckman, 1991).

Dalam teori konstruksi sosial, agama juga mengalami proses eksternalisasi saat menjadi sesuatu yang dibagikan oleh masyarakat. Manusia berinteraksi dengan lingkungannya dalam konteks sosial, di mana masyarakat mengembangkan dimensi objektif melalui eksternalisasi dan objektivasi, serta dimensi subjektif melalui internalisasi. Proses-proses ini berjalan secara dialektis dalam masyarakat, yang menghasilkan realitas sosial sebagai hasil dari konstruksi yang dilakukan manusia.

Teori konstruksi sosial digunakan dalam penelitian ini untuk memahami realitas sosial. Berger dan Luckmann menunjukkan bahwa konstruksi sosial terjadi melalui interaksi sosial dan komunikasi yang menggambarkan realitas. Realitas sosial terbentuk melalui pengalaman bersama dalam masyarakat melalui bahasa dan struktur sosial. Berger menggabungkan pandangan Durkheim tentang objektivitas dan pandangan Weber tentang subjektivitas untuk memahami realitas yang bersifat intersubjektif. Bagi Berger, objektivitas dan subjektivitas tidak dapat dipisahkan, berbeda dengan pandangan Durkheim dan Weber yang menekankan hierarki antara masyarakat dan individu (Ferry Adhi Dharma, 2018).

Menurut Berger, masyarakat adalah realitas yang terdiri dari aspek objektif dan subjektif. Sebagai realitas objektif, masyarakat berada di luar individu dan berinteraksi dengannya. Di sisi lain, sebagai realitas subjektif, individu tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat tetapi juga berperan aktif dalam membentuk masyarakat itu sendiri. Dalam teori konstruksi sosial, terdapat proses dialektis antara pengalaman subjektif individu dalam konteks

agama dan realitas objektif moderasi beragama. Proses ini menghasilkan berbagai perspektif terkait dengan moderasi beragama.

Dalam teori Berger, ada tiga proses konstruksi sosial yang penting: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Berger dan Luckmann dalam sosiologi pengetahuan menekankan bahwa pemahaman terhadap dunia kehidupan selalu melibatkan hubungan dialektis antara individu dan dunia sosio-kultural. Proses dialektis ini terdiri dari eksternalisasi (penyesuaian individu dengan dunia sosio-kultural yang merupakan hasil dari tindakan manusia), objektivasi (interaksi individu dengan dunia sosial yang disepakati dan terinstitusionalisasi secara kolektif), dan internalisasi (identifikasi individu dengan nilai-nilai dan struktur sosial dari institusi sosial atau organisasi di mana individu terlibat sebagai anggota).

Dalam teori Berger, tahapan eksternalisasi dan objektivasi membentuk masyarakat melalui proses yang disebut sosialisasi primer. Ini terjadi ketika individu mencari perannya dalam masyarakat, menganggap masyarakat sebagai sesuatu yang berada di luar dirinya yang bersifat objektif. Dalam tahap internalisasi, individu menginternalisasi dan mempertahankan norma sosial melalui proses legitimasi yang disebut objektivasi sekunder, di mana norma-norma ini diterima secara subjektif. Ketiga proses dialektis ini menciptakan fenomena sosial yang saling berintegrasi dan menghasilkan realitas sosial, yang pada dasarnya merupakan hasil dari kreativitas dan interaksi subjektif manusia.

Menurut teori konstruksi sosial Berger, realitas sosial moderasi beragama dipertahankan melalui teks-teks agama yang menjadi doktrin umat beragama. Doktrin agama mampu melegitimasi diskusi tentang moderasi beragama, terutama ketika agama digunakan sebagai ideologi negara. Akibatnya, moderasi beragama menjadi bagian yang kuat dan bertahan lama dalam realitas sosial umat beragama, sulit untuk dihilangkan. Berikut adalah proses dialektika konstruksi sosial mengenai moderasi beragama melalui tiga momen simultan: Pertama, Eksternalisasi dalam konteks elit agama mencakup adaptasi dengan teks-teks kehidupan yang abstrak, seperti kitab suci atau kitab rujukan, yang memerlukan penafsiran pluralistik. Mereka menggunakan dasar-dasar teks ini untuk menjelaskan fenomena sosial-keagamaan dan memperkuat pandangan mereka. Selain itu, elit agama juga beradaptasi dengan nilai-nilai dan tindakan dalam relasi antarumat beragama, dengan sikap menerima atau menolak sesuai konteksnya. Ini menunjukkan bagaimana teks-teks dan praktik kehidupan sehari-hari mempengaruhi pandangan hidup dan tindakan mereka dalam konteks sosio-religius.

Kedua, Objektivasi adalah proses di mana elit agama berinteraksi dengan dunia yang telah dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. Dalam perspektif elit agama, institusi sosio-kultural dan dunia luar dianggap sebagai entitas terpisah yang saling berinteraksi melalui proses objektivasi. Dialektika antara elit agama dan realitas luar memungkinkan terciptanya pemahaman baru tentang moderasi beragama. Meskipun perilaku elit agama di dalam dan di luar institusi sering dianggap sebagai entitas yang berbeda, tindakan individu sebenarnya merupakan hasil dari proses sosial yang sedang

berlangsung melalui konstruksi sosial ini. Dunia sosial institusi dan luar institusi saling berkompetisi untuk mempengaruhi elit agama.

Institusionalisasi adalah proses di mana kesadaran mengenai nilai-nilai yang digunakan untuk memahami tindakan menjadi tidak terpisahkan dari pelaksanaan tindakan itu sendiri. Para elit agama tidak hanya mengikuti tradisi (*taqlid*), tetapi juga memahami argumen, tujuan, dan manfaat dari tindakan tersebut (*ittiba'*). Habitualisasi terjadi ketika tindakan yang semula rasional dan bermaksud menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, tindakan tersebut tidak lagi memerlukan interpretasi mendalam karena telah menjadi bagian integral dari sistem penilaian dan pemahaman, dilakukan secara otomatis dan mekanis.

Ketiga, Internalisasi merujuk pada proses di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, norma, dan struktur sosial dari lembaga-lembaga atau organisasi sosial di mana mereka aktif sebagai anggota. Identifikasi ini terjadi melalui dua jalur sosialisasi utama: sosialisasi primer melalui keluarga dan sosialisasi sekunder melalui organisasi lainnya. Keluarga berperan penting dalam membentuk pemahaman dan tindakan individu sesuai dengan tafsir yang dianut. Misalnya, dalam keluarga dengan pemikiran keagamaan puritan, individu cenderung menginternalisasi dan mentransformasikan pemikiran yang sejalan dengan puritanisme. Sebaliknya, dalam keluarga dengan pemikiran keagamaan moderat, individu akan cenderung menginternalisasi dan mentransformasikan pemikiran yang moderat pula, dan begitu seterusnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada fenomena alami. Pendekatan ini bersifat mendasar dan naturalistik (Miles et al., 2014). Peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan informasi, namun kehadiran peneliti tidak mempengaruhi perilaku subjek penelitian. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai investigasi naturalis (Ali, 2010) Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dimulai sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah penelitian selesai (Kasiram, 2010). Pendekatan analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga proses interaktif. Proses ini meliputi tahapan seperti mereduksi data, menyajikan data secara sistematis, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan. Analisis dimulai sebelum pengumpulan data dimulai, pada tahap perencanaan, dan perancangan penelitian (Miles et al., 2014).

Penelitian ini menerapkan metode untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono. Ini mencakup validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Metode ini digunakan untuk memastikan kehandalan dan validitas hasil penelitian secara menyeluruh. Validitas internal dievaluasi melalui teknik triangulasi, yang mengintegrasikan data dari berbagai teknik dan sumber data untuk memperkuat keyakinan terhadap temuan. Dalam konteks ini, penelitian

menggunakan dua jenis triangulasi: triangulasi metode (penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan data) dan triangulasi sumber (memanfaatkan data dari berbagai sumber yang berbeda) untuk memastikan ketepatan dan keakuratan hasil penelitian (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Moderasi Beragama

Moderasi beragama telah ditetapkan sebagai isu krusial dalam pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. RPJMN tersebut menekankan bahwa moderasi beragama menjadi syarat esensial dalam upaya pembangunan nasional. Pemerintah menekankan urgensi moderasi beragama untuk memperkuat toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial di masyarakat. Kementerian Agama selanjutnya mengintensifkan komitmennya melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 yang menetapkan Rencana Strategis Kementerian Agama untuk periode 2020-2024.

Pada tahun 2023, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 sebagai panduan bagi pemerintah pusat, daerah, dan umat beragama untuk memperkuat moderasi beragama. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk karakter sumber daya manusia Indonesia yang moderat. Peraturan Presiden ini mencakup lima strategi utama: pertama, memperkuat cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat; kedua, meningkatkan harmoni dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan; ketiga, menyelaraskan hubungan antara praktik keagamaan dan budaya; keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan pelayanan publik; kelima, mengembangkan ekonomi dan sumber daya keagamaan (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama, 2023).

Program moderasi beragama yang dijalankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mencakup berbagai inisiatif untuk memperkuat pemahaman dan penerapan moderasi dalam kehidupan beragama di masyarakat, antara lain:

Tabel 3. Program dan Kegiatan Moderasi Beragama
(Kementerian Agama Kabupaten Bantul, 2023)

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penguatan moderasi beragama melalui pembelajaran PAI bagi PPAI dan GPAI	Seksi Pendidikan Agama Islam
2	Penguatan moderasi beragama pada ekstrakurikuler Rohis SMA/SMK	
3	Pembinaan Moderasi Beragama bagi guru Raudatul Atfal	Seksi Pendidikan Madrasah
4	Pembinaan Moderasi Beragama bagi guru Madrasah Ibtidaiyah	
5	Pembinaan moderasi beragama bagi guru MTs dan MA	

6	Pembinaan wawasan kebangsaan lembaga keagamaan Islam	Seksi PD Pontren
7	Semarak Kerukunan Karanggede	Humas
8	Kampung Moderasi Beragama	

Implementasi Program Moderasi Beragama

1. Penguatan Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah/Madrasah

Kementerian Agama Kabupaten Bantul memulai program moderasi beragama di lingkungan sekolah/madrasah dengan memberikan pembinaan kepada guru-guru di semua jenjang pendidikan: RA, MI, SMA/K, dan MA serta ekstrakurikuler Rohis SMA/SMK. Pembinaan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, dan seminar. Materi yang disampaikan beracuan pada indikator moderasi beragama seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap budaya. Pembinaan di lingkungan sekolah/madrasah berperan penting dalam menanamkan sikap moderat kepada guru dan peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler Rohis. Kegiatan ini sangat penting untuk mewujudkan harmonisasi dan dinamika masyarakat beragama di Kabupaten Bantul, dengan guru agama di sekolah/madrasah sebagai pelopor moderasi beragama di wilayah mereka masing-masing.

Pembinaan adalah proses di mana individu mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, baik dalam pekerjaan saat ini maupun dalam posisi yang akan diemban di masa depan (Jackson et al., 2006). Tujuannya adalah meningkatkan kinerja pegawai agar lebih efektif dan efisien (Ivancevich & Konopaske, 2008). Dalam konteks pembinaan guru agama, peran Kementerian Agama sangat penting. Kementerian ini bertugas mengawasi pelaksanaan pendidikan di madrasah/sekolah. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama secara terprogram dan didasari oleh tanggung jawab adalah faktor utama dalam meningkatkan kompetensi profesional guru agama, terutama terkait dengan moderasi beragama.

2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan Lembaga Keagamaan Islam

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Bantul mengadakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan bagi lembaga pendidikan keagamaan Islam. Kegiatan ini melibatkan peserta dari pondok pesantren, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ), dan Madrasah Diniyah. Tujuan utamanya adalah memperkuat identitas dan karakter bangsa, yang merupakan bagian integral dari misi pendidikan nasional bagi lembaga keagamaan Islam. Wawasan kebangsaan ini terkait erat dengan konsep moderasi beragama, yang mencakup nilai toleransi sebagai respons terhadap radikalisme agama yang berpotensi mengancam kehidupan beragama dan kesatuan sosial, bangsa, dan negara secara keseluruhan.

Komitmen kebangsaan merupakan penilaian terhadap seberapa jauh pandangan, sikap, dan praktik beragama seseorang memengaruhi dukungan terhadap kesepakatan dasar negara. Ini mencakup penerimaan Pancasila

sebagai ideologi negara, sikap terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta rasa nasionalisme. Bagian dari komitmen kebangsaan ini juga mencakup penerimaan nilai-nilai berbangsa yang diatur dalam Konstitusi UUD 1945 dan peraturan-peraturan terkait. Dengan demikian, program pembinaan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh PD Pontren berperan penting dalam menanamkan komitmen kebangsaan di kalangan lembaga pendidikan keagamaan Islam, yang pada gilirannya mendukung upaya moderasi beragama di Kabupaten Bantul.

3. Kampung Moderasi Beragama

Kegiatan sosialisasi dan perintisan kampung moderasi beragama dilakukan melalui kunjungan silaturahmi dan dialog dengan masyarakat dan tokoh lintas agama setempat. Dusun Gunturgeni dipilih untuk sosialisasi dan perintisan kampung moderasi beragama karena mencerminkan pluralitas, dengan adanya dua gereja (Katolik dan Kristen Jawa), dua masjid, dan sebuah mushola di tingkat kampung. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama, menciptakan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya moderasi beragama untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman (Kementerian Agama Kabupaten Bantul, 2023).

Program kampung moderasi beragama merupakan upaya dari Kementerian Agama RI untuk membentuk komunitas di tingkat kampung, desa, atau kelurahan yang menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi antara umat beragama, serta mendukung terciptanya harmoni dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat kehidupan yang harmonis dalam keragaman, mendorong sikap beragama yang moderat, dan memperkuat sikap toleransi. Dalam pelaksanaannya, ada empat indikator yang menjadi pedoman untuk pemahaman beragama yang moderat, yaitu komitmen terhadap kebangsaan dan loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), toleransi, penolakan terhadap kekerasan, serta penghargaan terhadap tradisi budaya lokal.

4. Semarak Kerukunan Karanggede

Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi yang melibatkan senam bersama, dialog dengan tokoh-tokoh agama, dan pemberian bantuan untuk tempat-tempat ibadah dalam acara Semarak Kerukunan Karanggede. Bantuan tersebut disalurkan kepada empat tempat ibadah di Dusun Karanggede, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon: Masjid Darul Falah, Susteran Gembala Baik, Pura Karanggede, dan GPDI Pendowoharjo. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan solidaritas di masyarakat (Kementerian Agama Kabupaten Bantul, 2023).

Kegiatan ini melibatkan senam bersama, dialog dengan tokoh agama, dan pemberian bantuan kepada tempat-tempat ibadah dengan tujuan menjalin persatuan dan kerukunan umat beragama. Senam dan dialog dianggap efektif dalam menyampaikan pesan kerukunan karena peserta dapat berinteraksi tanpa batasan keagamaan. Pemberian bantuan kepada tempat-tempat ibadah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan

pelayanan publik, sesuai dengan strategi utama dalam penguatan moderasi beragama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih merasakan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman.

Moderasi Beragama sebagai Realitas Sosial

Moderasi beragama yang diterapkan oleh masyarakat Bantul merupakan hasil proses sosial yang membentuk struktur sosial di mana sikap moderasi beragama menjadi norma dan dijadikan gaya hidup. Struktur ini terbentuk melalui interpretasi-interpretasi keagamaan oleh para tokoh agama terdahulu, organisasi keagamaan, dan kebiasaan-kebiasaan yang telah membudaya. Teori konstruksi sosial Peter L. Berger menyatakan bahwa agama sebagai bagian dari budaya adalah konstruksi manusia, menciptakan hubungan timbal balik antara masyarakat dan agama. Agama, meskipun berada di luar individu, dianggap nyata karena diakui dan diinterpretasikan oleh manusia melalui teks dan norma, lalu diinternalisasi menjadi pedoman hidup. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena dibagikan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, manusia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya melalui proses eksternalisasi dan objektivasi, serta membentuk dimensi subjektif melalui internalisasi. Proses-proses ini berlangsung secara dialektis, sehingga realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial oleh manusia (Berger, 1991).

Pertama, Eksternalisasi merupakan proses adaptasi individu dengan dunia sosio-kultural melalui teks keagamaan dan interpretasi para tokoh agama terdahulu yang menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki basis historis dan dasar normatif. Dalam proses eksternalisasi, individu berusaha menyelaraskan pemahaman kognitifnya dengan realitas sosial yang ada, kemudian menerapkannya di masyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Bantul telah membentuk struktur sosial melalui moderasi beragama, yang berperan dalam membentuk nilai dan norma kehidupan serta menciptakan lingkungan yang harmonis. Struktur ini membantu individu beradaptasi dalam masyarakat secara terus menerus.

Kementerian Agama Kabupaten Bantul menjalankan berbagai program pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh-tokoh lintas agama sebagai upaya membentuk struktur sosial yang harmonis. Kementerian ini menyesuaikan konsep moderasi beragama dengan keragaman latar belakang masyarakat Bantul, mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama kepada individu-masyarakat dalam konteks dan budaya mereka. Sebagai pengelola kerukunan umat beragama, Kementerian Agama Kabupaten Bantul berperan dalam mempromosikan moderasi beragama sesuai tugasnya, dengan tujuan mencapai keselarasan ide dan pandangan, serta menghindari konflik dalam interpretasi moderasi beragama. Dengan demikian, diharapkan tercipta masyarakat yang saling menghormati dan hidup damai meskipun berbeda latar belakang dan keyakinan.

Berger menyatakan bahwa dunia sosial terus berubah, termasuk nilai dan norma dalam masyarakat yang beradaptasi dengan generasi yang bertanggung jawab pada masa itu. Penyesuaian ini penting agar individu dapat berinteraksi

dalam dunia sosial. Nilai dan kebiasaan dalam masyarakat dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh pandangan individu terhadap moderasi beragama. Pemahaman yang sempit tentang moderasi beragama dapat menghasilkan sikap intoleran, yang berpotensi menyebabkan perilaku negatif dan konflik antar agama. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui pemahaman dan praktik moderasi beragama agar sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu menjaga kerukunan dalam masyarakat yang beragam.

Kedua, Objektivasi adalah tahap kedua dalam dialektika sosial, di mana individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Di masyarakat Bantul, fenomena ini mencakup konsep moderasi beragama sebagai nilai fundamental yang mengilhami pembentukan kebiasaan yang kemudian diinstitusikan. Kegiatan ini mencakup penguatan moderasi beragama di lingkungan sekolah/madrasah, pembinaan wawasan kebangsaan di lembaga keagamaan Islam, inisiasi kampung moderasi beragama, dan semarak kerukunan Karanggede adalah proses mengubah kesadaran tentang moderasi beragama menjadi tindakan dan kebiasaan.

Individu yang membentuk masyarakat dan sebaliknya tidak hanya mengikuti pendahulu (*taqlid*), tetapi juga memahami argumen, tujuan, dan manfaat dari tindakan tersebut. Habitualisasi terjadi ketika tindakan rasional menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Program-program yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten Bantul menjadi bagian dari sistem kognitif dan evaluatif masyarakat. Ketika tindakan menjadi habitualisasi, tindakan tersebut dilakukan secara otomatis dan mekanis.

Pada tahap pelembagaan, tindakan ini memperkuat struktur sosial yang ada. Kementerian Agama Kabupaten Bantul melaksanakan kontrol sosial melalui kegiatan seperti inisiasi kampung moderasi beragama, dialog dengan tokoh lintas agama, dan pemberian bantuan kepada tempat-tempat ibadah. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk kontrol sosial tetapi juga untuk menggali pendapat dan mencari solusi guna menciptakan kerukunan yang objektif.

Menurut Berger, pelembagaan adalah pengendali utama yang diwujudkan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Pelembagaan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, sehingga setiap program yang direncanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bantul bertujuan untuk mempromosikan dan mempertahankan moderasi beragama (Peter L. Berger and Thomas Luckmann, 1979).

Ketiga, Tahap akhir dalam proses konstruksi sosial adalah internalisasi, di mana individu mengenali dan mengidentifikasi dirinya dalam konteks masyarakat. Individu yang dikenali oleh masyarakat adalah mereka yang mampu melibatkan diri dalam realitas sosial. Internalisasi adalah proses penyerapan dan transformasi kembali realitas objektif ke dalam kesadaran subjektif. Pada tahap ini, pelembagaan yang terjadi selama objektivasi diinternalisasikan oleh individu, memperkuat identifikasi dirinya dalam masyarakat. Proses ini memastikan bahwa nilai dan norma sosial menjadi

bagian dari kesadaran individu, sehingga mereka dapat berperan aktif dan harmonis dalam struktur sosial yang ada.

Menurut Berger, proses internalisasi dapat dipahami melalui kata kunci "sosialisasi." Internalisasi berjalan efektif melalui dua jenis sosialisasi: primer dan sekunder. Pertama, jalur sosialisasi primer adalah keluarga. Sosialisasi primer terjadi dalam keluarga, di mana Program Kampung Moderasi Beragama membantu membentuk pemahaman dan tindakan individu tentang moderasi beragama sejak dini. Misalnya, dalam keluarga dengan pemikiran keagamaan puritan, individu cenderung menginternalisasi dan mentransformasikan pemikiran yang sejalan dengan puritanisme. Sebaliknya, dalam keluarga dengan pemikiran keagamaan moderat, individu akan cenderung menginternalisasi dan mentransformasikan pemikiran yang moderat pula, dan begitu seterusnya.

Kedua, sosialisasi sekunder dilakukan oleh tokoh keagamaan di Kabupaten Bantul melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memperkuat pemahaman tentang moderasi beragama. Melalui upaya ini, masyarakat dapat mengidentifikasi diri mereka dalam konteks keragaman yang ada di sekitar mereka. Selain itu, organisasi lain seperti organisasi keagamaan juga berperan dalam mempromosikan moderasi beragama. Keanggotaan individu dalam organisasi ini menjadi cara untuk memudahkan pengenalan diri mereka. Namun, organisasi yang memiliki pandangan ekstrem cenderung menghadapi kesulitan dalam mengakui dan menerima pandangan moderasi beragama terhadap perbedaan, meskipun Kabupaten Bantul memiliki masyarakat yang beragam dalam hal keagamaan, namun terkadang cenderung mempertahankan pandangan yang lebih tertutup.

Kementerian Agama Kabupaten Bantul mengantisipasi penolakan terhadap moderasi beragama dengan mengidentifikasi dan melibatkan pihak terkait, serta melakukan mediasi untuk mengurangi kemungkinan konflik. Penolakan ini dilihat dari rekam jejak individu, apakah mereka pendatang baru yang belum memahami budaya lokal di Kabupaten Bantul atau memiliki pemahaman agama yang kaku yang cenderung menyalahkan praktik yang sudah ada di masyarakat Bantul. Melalui momen ini, Kementerian Agama Kabupaten Bantul dapat mengevaluasi keberhasilan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama yang telah disosialisasikan kepada masyarakat.

Tabel 4. Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi

Momen	Proses	Fenomena
Eksternalisasi	Adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural	Individu menyesuaikan diri dengan moderasi beragama melalui teks keagamaan dan interpretasi dari tokoh-tokoh agama yang berperan sebagai agen moderasi beragama Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural	Individu mengembangkan kesadaran dan keyakinan bahwa moderasi beragama adalah tindakan positif untuk

		menciptakan kerukunan antarumat beragama, kesatuan, dan persatuan. Tindakan ini menjadi kebiasaan melalui tradisi dan pelebagaan dalam ruang budaya melalui program-program yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural	Individu mengidentifikasi diri berdasarkan penggolongan sosial yang berbasis historis dan teologis-ideologis, menghasilkan kelompok yang menerima dan menolak, yaitu kelompok eksklusif dan inklusif atau fundamentalis dan moderat.

Tantangan dan Strategi Implementasi Program Moderasi Beragama

Tantangan dalam menerapkan moderasi beragama di Kabupaten Bantul meliputi beberapa hal. Pertama, meningkatnya pandangan, sikap, dan praktik beragama yang ekstrem, yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, adanya klaim kebenaran yang bersifat subyektif dan upaya pemaksaan tafsir agama, yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik, yang berpotensi memicu konflik. Ketiga, adanya kelompok agama yang menentang moderasi beragama dan menunjukkan semangat beragama yang tidak sejalan dengan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Agisthia Lestari, 2022).

Menurut Quraish Shihab, langkah-langkah penting dalam mewujudkan moderasi beragama, yaitu: Pertama, penting untuk memahami al-Qur'an dan sunnah dengan memperhatikan tujuan syariat (maqasid asy-syariah) serta menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kedua, bekerja sama dengan berbagai kalangan umat Islam dalam hal-hal yang disepakati, serta bertoleransi terhadap perbedaan dan menjaga kesetiaan terhadap sesama mukmin dan toleransi terhadap non-muslim. Ketiga, menyatukan ilmu dengan iman, mengintegrasikan kreativitas material dengan spiritualitas, dan menghubungkan kekuatan ekonomi dengan moral.

Keempat, menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan sosial seperti keadilan, musyawarah, kebebasan yang bertanggung jawab, dan hak asasi manusia. Kelima, mengajak untuk melakukan pembaruan sesuai dengan tuntunan agama dan mendorong ijtihad pada situasi yang relevan. Keenam, memberikan perhatian besar pada membina persatuan dan kesatuan, serta menghindari perbedaan dan konflik dengan pendekatan yang inklusif. Ketujuh, memaksimalkan pemanfaatan warisan dan pemikiran lama dari para teolog Muslim, sufi, para pendahulu, serta ahli hukum dan ushuluddin untuk memperkaya pemahaman agama (Shihab, 2019).

Dalam menerapkan moderasi beragama di Kabupaten Bantul, diperlukan berbagai strategi program dan kebijakan. Pertama, sebagai daerah yang beragam dan multikultural, potensi konflik berbasis agama sangat

signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan moderasi beragama kepada seluruh aparat pemerintah, tidak hanya di Kementerian Agama tetapi juga di semua lembaga pemerintah dan semua lapisan masyarakat, mulai dari keluarga hingga komunitas dan organis. Kedua, optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga binaan serta mitra Kementerian Agama Bantul, seperti Majelis Ulama Kabupaten Bantul, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dalam menyosialisasikan moderasi beragama. Ketiga, penguatan regulasi yang mengatur moderasi beragama. Keempat, deteksi dini dan pencegahan potensi konflik berlatar agama dengan melibatkan semua pihak di tingkat lokal dan daerah, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, Dukuh, Lurah, Panewu, unsur TNI/Polri, dan pihak terkait lainnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dialektika konstruksi sosial yang membentuk moderasi beragama di masyarakat melibatkan tiga tahap: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah proses di mana individu menyesuaikan diri dengan dunia sosio-kultural, mengikuti struktur sosial yang ditetapkan melalui teks keagamaan, interpretasi tokoh agama, dan peran organisasi keagamaan sebagai agen moderasi. Objektivasi terjadi ketika individu berinteraksi dengan dunia sosio-kultural, mengembangkan kesadaran bahwa moderasi beragama adalah tindakan positif untuk menciptakan harmonisasi kehidupan beragama. Ini menjadi kebiasaan melalui tradisi dan pelebagaan budaya. Internalisasi adalah proses di mana individu mengidentifikasi diri mereka dalam konteks sosio-kultural, berdasarkan sejarah dan aspek teologis-ideologis, yang membentuk kelompok yang inklusif atau eksklusif, fundamentalis atau moderat. Program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bantul memainkan peran penting dalam membentuk fondasi sosial yang kokoh untuk moderasi beragama di masyarakat.

Sosialisasi moderasi beragama harus dilakukan secara luas, dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Penting untuk mengoptimalkan peran organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah, dan FKUB dalam mensosialisasikan moderasi beragama. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi terkait moderasi beragama serta perancangan program-program inovatif yang mendukungnya. Deteksi dan pencegahan dini konflik beragama harus melibatkan semua elemen masyarakat dan instansi terkait untuk memastikan harmoni dan kerukunan.

PENELITIAN LANJUTAN

Karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan peneliti, peneliti menyadari bahwa artikel ini masih memiliki banyak kekurangan dalam bahasa dan penulisan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dari berbagai sumber untuk menyempurnakan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agisthia Lestari. (2022). Politik Rekognisi Sebagai Penyelesaian Konflik Agama Di Dalam Masyarakat Multikulturalan (Studi Kasus Di Kabupaten Bantul). *Jurnal Adhikari*, 1(4), 204–220. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i4.50>
- Ali, M. (2010). *Metodologi Dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Pustaka Cendekia Utama.
- Ari, S. (2022). *Seorang Guru SMPN 1 Pandak Bantul Tegur Siswi Karena Tak Pakai Jilbab, Ini Penjelasan Berbagai Pihak*. *Tribun Jogja*. <https://jogja.tribunnews.com/2022/08/03/seorang-guru-smpn-1-pandak-bantul-tegur-siswi-karena-tak-pakai-jilbab-ini-penjelasan-berbagai-pihak>
- Aslati. (2014). Optimalisasi Peran FKUB dalam Menciptakan Toleransi Beragama. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 6(2), 188–199. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/906>
- Aziz, A., & Anam, A. K. (2021). *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama (Jiwa) 2020-2023*. <https://bantulkab.bps.go.id/indicator/108/194/1/persentase-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama.html>
- Basedau, M., & Koos, C. (2015). When Do Religious Leaders Support Faith-Based Violence? Evidence from a Survey Poll in South Sudan. *Political Research Quarterly*, 68(4), 760–772. <https://doi.org/10.1177/1065912915603128>
- Berger, P. L. (1991). *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. LP3ES.
- Berger, P. L., & Luckman, T. (1991). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. LP3ES.
- Bowen, J. R. (2010). Religious Discrimination and Religious Governance Across Secular and Islamic Countries: France and Indonesia as Limiting Cases. *American Behavioral Scientist*, 53(12), 1749–1762. <https://doi.org/10.1177/0002764210368095>
- Brisko, B. (2012). The socialization process and the functional significance of education from vocational education learners' perspective. *SHS Web of Conferences*, 2, 00008. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20120200008>
- Çalışkan, H., & Sağlam, H. I. (2012). A study on the development of the tendency to tolerance scale and an analysis of the tendencies of primary school students to tolerance through certain variables. *Kuram ve*

Uyulamada Egitim Bilimleri, 12(2), 1440–1445.

- Damayanti, T. W., Riyadi, & Nugroho. (2022). *Laporan Kinerja*. <https://drive.google.com/file/d/1Am0NwJIT9WnFlsgkJhbWNRh5kSeWt-kZ/view>
- Ferry Adhi Dharma. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 10–16. <https://doi.org/10.21070/kanal.v%vi%i.3024>
- Ivancevich, J. M., & Konopaske, R. (2008). *Perilaku dan manajemen organisasi*. Erlangga.
- Jackson, J. H., Angelica, D., & Mathis, R. L. (2006). *Human resource management : Manajemen sumber daya manusia*. Salemba empat.
- Jateng, T. D. (2023). Penutupan Patung Bunda Maria di Jogja: Awal Mula hingga Penyebab. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-6637464/penutupan-patung-bunda-maria-di-jogja-awal-mula-hingga-penyebab>
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. UIN Maliki Press.
- Kementerian Agama Kabupaten Bantul. (2022). *Sambut Puncak HAB Kemenag Bantul Ke 76, Ki Totok Pentaskan Wayang Kulit Lakon Abimanyu mBangun Moderasi Kesatriyan*. Kementerian Agama Kabupaten Bantul. <https://bantul.kemenag.go.id/sambut-puncak-hab-kemenag-bantul-ke-76-ki-totok-pentaskan-wayang-kulit-lakon-abimanyu-mbangun>
- Kementerian Agama Kabupaten Bantul. (2023). *Perintisan Kampung Moderasi Beragama di Srandakan*. Kementerian Agama Kabupaten Bantul. <https://bantul.kemenag.go.id/perintisan-kampung-moderasi-beragama-di-srandakan>
- Kementerian Agama Kabupaten Bantul. (2023). *Semarak Kerukunan Karanggede oleh Kankemenag Bantul*. Kementerian Agama Kabupaten Bantul. <https://bantul.kemenag.go.id/semarak-kerukunan-karanggede-oleh-kankemenag-bantul>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama., (2012).
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

- Kevin Nobel Kurniawan. (2021). *Pendidikan Toleransi Beragama, Sebuah Kajian Sosiologi tentang Peran dan Hambatan Sekolah dalam Membangun Hubungan Antarkelompok Beragama/Pendidikan Toleransi Beragama, Sebuah Kajian Sosiologi tentang Peran dan Hambatan Sekolah dalam Membangun Hubungan An*. LIPI Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nazmudin, N. (2018). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>
- Nur Syam. (2005). *Islam Pesisir*. LKiS.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2023). *Sekilas Kabupaten Bantul*. https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020020001/sekilas-kabupaten-bantul.html
- Peter L. Berger and Thomas Luckmann. (1979). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Books.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265185/perpres-no-58-tahun-2023>
- Rachmawati. (2022). *Perjalanan Kasus Siswi Dipaksa Pakai Jilbab di SMAN 1 Banguntapan, Memilih Pindah dan Sepakat Berdamai*. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/08/11/124700878/perjalanan-kasus-siswi-dipaksa-pakai-jilbab-di-sman-1-banguntapan-memilih?page=3>
- Rohman, M. S. (2023). Pengelolaan Keragaman dan Penanganan (In)Toleransi: Studi Kasus Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan di Yogyakarta. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 2(1), 59-84. <http://jurnal>.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah*. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Zaki, M. (2018). *Menyemai Toleransi Merawat NKRI: Ikhtiar Pengembangan Pendidikan Agama Melalui Program Imtaq*. Sanabil.